



Analisis Aktor *Collaborative Governance* Dalam Program Pemuda Hebat Kabupaten Ponorogo

Moch. Rifqi Mei Redha¹⁾, Yusuf Adam Hilman²⁾ *

¹⁾²⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jalan Pramuka No 10 Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur 63471, Indonesia

* Korespondensi Penulis. E-mail: adam_hilman@umpo.ac.id, Telp: +6281296125801

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mempunyai terobosan program sebagai sarana untuk promosi potensi desa melalui pemuda. Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini menghadirkan satu program untuk para pemuda ini dengan nama pemuda hebat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar aktor yang terlibat dalam kerjasama dan kolaborasi sebagai tim dalam program pemuda hebat Kabupaten Ponorogo dan untuk mengidentifikasi proses *collaborative governance* yang terjadi antar aktor yang berperan penting dalam keberhasilan program tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan teoritis dari (Ansell dan Gash 2007) yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dilakukan analisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam program pemuda hebat Kabupaten Ponorogo berjalan secara efektif dilihat dari kondisi awal dan proses kolaborasi yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan bersama.

Kata kunci; *Collaborative Governance; Program Pemuda Hebat; Ponorogo;*

Actor Analysis of Collaborative Governance in the Ponorogo Regency Great Youth Program

Abstract

The Ponorogo Regency Government has a breakthrough program that promotes village potential through youth. In this case, the Ponorogo Regency Government is presenting a program for these young people called Great Youth. This research aims to analyse the relationships between actors involved in cooperation and collaboration as a team in the Ponorogo Regency Great Youth Program and to identify the collaborative governance process between actors who play an essential role in the program's success. This research uses descriptive qualitative methods and a theoretical approach from Ansel and Gash (2007), which is the basis for this research. Data was collected through interview, observation, and documentation techniques and then analysed through data reduction, data presentation, and conclusion. This research shows that collaborative governance in the Ponorogo Regency's great youth program is running effectively, as seen from the initial conditions and the collaboration process, which is running well and by the targets set together.

Keyword; *Collaborative Governance; Great Youth Program; Ponorogo;*





PENDAHULUAN

Collaborative governance merupakan model kontrol dari satu atau lebih lembaga publik yang memberikan partisipasi langsung pemangku kepentingan *non-state* dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, deliberatif, dan berorientasi pada konsensus dan bertujuan untuk memungkinkan pengembangan atau implementasi kebijakan publik, serta mengelola program atau aset publik (Islamy, 2018). *Collaborative governance* juga disebut sebagai *adaptive management* untuk menjamin keterlaksanaan sebuah program (Supriadi, 2018). *Collaborative governance* pada awalnya hanya berupa ide namun akhirnya terwujud dalam bentuk kolaborasi antara banyak aktor dan pemangku kepentingan. (Aribowo dkk, 2018). Dalam penerapannya menjadi lebih sempurna yaitu *collaborative governance* di mana lembaga publik dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan dan tujuan atau program harus ikut serta dalam pelaksanaan program tersebut (Ardana, 2022). Untuk memberikan hasil maksimal dalam kolaborasi, *stakeholder* perlu memperhatikan beberapa hal meliputi kepemimpinan, budaya, strategi yang digunakan, kelompok yang terlibat, dan struktur kelembagaan (Ikhsan dkk, 2019). Menurut Qoyimah dkk. (2023) Keberhasilan dari kolaborasi membutuhkan landasan berupa prinsip untuk dapat dipahami oleh semua pihak atau *stakeholder* di dalamnya agar mengetahui tanggung jawab serta peran

dari masing-masing dalam menjalankan sebuah kolaborasi sesuai kesepakatan bersama (Sukanti & Faidati, 2021).

Merujuk pada tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah semestinya tidak berperan sendiri karena perlu adanya lembaga non pemerintahan yang ikut serta (Zakia & Wicaksono, 2023). Sejalan dengan rujukan tersebut proses kolaborasi antar aparat birokrasi dalam hal ini harus dapat melibatkan pejabat struktural dan non struktural (Idris dkk, 2022) sebagaimana aktor dalam tata kelola kolaboratif sebagai alat yang ampuh pemecahan masalah karena tata kelola kolaboratif menciptakan "kepemilikan bersama" atas masalah. Peserta yang beragam memiliki perspektif yang berbeda ketika melihat suatu masalah (Doi, 2023). Tata kelola kolaboratif berfokus pada kebijakan dan isu publik (Nurhayati & Rahman, 2023). Konsep tata Kelola pemerintah menyatukan berbagai *stakeholder* bersama forum beserta lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan Keputusan yang mempunyai orientasi dalam *consensus* kesepakatan bersama (Alfiandri dkk, 2019). Dengan begitu dapat dikatakan jika, tata kelola kolaboratif mencakup fitur internal dan eksternal (Sher-Hadar dkk, 2020). Sebab tata kelola kolaboratif telah didorong oleh meningkatnya keinginan untuk meningkatkan proses dan kepuasan publik (Greenwood dkk, 2021). Hal tersebut sejalan dengan konsep pengembangan suatu wilayah yang bukan hanya menjadi kewajiban untuk aparat pemerintah saja melainkan juga menjadi





kewajiban bagi masyarakat maupun swasta. (Lestari, Yulyana, 2022).

Tata Kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan menyangkut mengenai pelaksanaan sistem pemerintahan yang mengacu kepentingan publik (Permatasari, 2023). Namun dapat dikatakan bahwa karena adanya implikasi politik dari strategi investasi pemerintah, pemerintah cenderung enggan menerima inovasi karena potensi risiko dalam mencoba sesuatu yang baru (O'Flynn & Wanna, 2008). Pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pembangunan nasional diarahkan untuk mampu mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain (Gurvantry dkk, 2022).

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mempunyai terobosan program sebagai sarana untuk promosi potensi desa. Dalam hal ini, Bupati Ponorogo menyampaikan akan menjadikan para generasi muda menjadi sebagai satu pengembang dan pegiat dari promosi produk dan profil desa di masing-masing kecamatan dengan melakukan suatu promosi digital di media sosial yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Ponorogo siap mendorong untuk setiap desa guna dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh pemudanya. Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini menghadirkan satu program untuk para pemuda ini dengan nama pemuda hebat (Nur, 2022).

Melalui Peraturan Bupati Ponorogo nomor 8 tahun 2022 mengenai petunjuk pelaksanaan dalam program pemuda hebat bagi desa di wilayah Kabupaten Ponorogo melalui bantuan keuangan khusus yang diberikan kepada desa tahun anggaran 2022. Program Pemuda Hebat

adalah program yang dilaksanakan untuk memberikan dukungan kepada komunitas pemuda dan pemudi yang melakukan pergerakan komunitas dari berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti (budaya, seni dan olahraga) sehingga dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar atau bahkan masyarakat, lingkungan yang lebih luas untuk kehidupan yang lebih baik. (Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2022). Berdasarkan Amanah tersebut diatas sebanyak 562 pemuda hebat yang berasal dari 281 desa se-Kabupaten Ponorogo, nantinya akan membuat konten dan pemetaan yang berkenaan dengan potensi yang dimiliki oleh desa masing-masing. (Hamzah, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Andayani dkk. (2022) yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian yang sedang dilakukan pengkajian tentang penggunaan pendekatan teoritis Ansel And Gash (2007) untuk menganalisa topik yang dikaji. Kemudian dalam penelitian ini, Andayani (2022) memaparkan bahwa kolaboratif dapat berjalan dengan baik seiring dengan pola dan alur yang dilalui selama proses kolaborasi berjalan dengan baik sehingga komunikasi yang terjaga tersebut memberikan hasil yang maksimal. Penelitian kedua oleh Saputra dan Ismaniar (2019) yang mempunyai relevansi dalam peran pemuda dalam melangsungkan proses pelaksanaan dalam *collaborative governance*, sebagai satu suksesi program kolaborasi yang sedang berlangsung. Penelitian ketiga oleh Sutrisna (2022) dengan garis besar penelitiannya pada partisipasi pemuda dalam kolaborasi yang dilakukan guna peningkatan partisipasi dalam pembangunan desa, sehingga pelaksanaan





kolaborasi dalam kolaborasi ini dapat berjalan maksimal karena adanya partisipasi dari pemuda. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dari segi kebaruan kasus baru, penelitian ini membahas tentang aktor dan peran *collaborative governance* yang dilakukan antara pemerintah kabupaten dengan akademisi untuk menggerakkan pemuda supaya dapat mengangkat dan mempromosikan potensi desa yang dimiliki.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami aktor *collaborative governance* dalam program pemuda hebat Kabupaten Ponorogo. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan aktor *collaborative governance* dalam program pemuda hebat Kabupaten Ponorogo. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya kerjasama dan kolaborasi dalam melaksanakan sebuah program daerah. Berangkat dari uraian diatas, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk mengangkat topik ini mengenai analisis aktor yang terlibat dalam *collaborative governance* pada Program Pemuda Hebat Kabupaten Ponorogo yang akan melakukan kolaborasi sehingga dari pertemuan pihak-pihak tersebut dapat menghadirkan kesepakatan bersama, hingga terjadinya kolaborasi dan kerjasama diantaranya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh data. Untuk mendeskripsikan sejumlah aktor dan proses dalam *collaborative Governance* dalam Program Pemuda Hebat Kabupaten Ponorogo secara terperinci.

Fokus penelitian ini adalah *collaborative governance* dimana mengacu pada model kolaborasi Ansell dan Gash (2007) yang menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersiklus yang terdiri dari empat parameter yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, proses kolaboratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Miles, Huberman, & Saldana (2014) dengan dilakukan dengan tiga langkah yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember tahun 2022 hingga April tahun 2023 dan berlokasi di Kabupaten Ponorogo. Subyek dalam penelitian ini adalah lima kelompok aktor yang terlibat dalam program pemuda hebat Kabupaten Ponorogo. Informan tersebut meliputi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo (Aktor Pemerintah), Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vendor pembuat aplikasi (Swasta), Wartawan Ponorogo (Media), dan dari pemuda hebat (Masyarakat). Teknik pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara,



observasi dan dokumentasi. Penentuan informan ditentukan dari hasil observasi peneliti selama kegiatan program pemuda hebat berlangsung, kemudian informan ditentukan melalui penelitian kualitatif dengan teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik *snowball sampling*, karena informan dalam penelitian ini akan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian melalui pengumpulan data yang berbeda dan dilakukan secara terus menerus hingga data tersebut jenuh. Sedangkan peneliti menggunakan dokumentasi sebagai pendukung validasi mengenai kelangsungan program ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini guna memberikan analisis dan memaparkan jawaban terkait permasalahan yang diteliti mengenai *collaborative governance* dalam Program Pemuda Hebat Kabupaten Ponorogo. Untuk dapat lebih jelas akan dijelaskan di bawah ini.

Kondisi Awal *Collaborative Governance*

Kondisi awal merupakan awal proses terjadinya fenomena atau pengaruh adanya proses kolaborasi yang menyebabkan para *stakeholder* mempunyai target yang akan dicapai bersama-sama. Kondisi awal ini sebagai pemicu terjadinya keinginan para pihak yang terlibat untuk melakukan kolaborasi baik itu dari pemerintah dan lembaga lainnya (Ridwan & Hartono, 2023).



Gambar 1. Surat Keputusan Bupati Ponorogo
(Sumber : Data Dokumen Pemerintah Kabupaten Ponorogo)

Dengan adanya Perbub tersebut Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo berkomitmen untuk menjangkau potensi-potensi pemuda yang hebat dari seluruh wilayah pelosok desa yang ada di Kabupaten Ponorogo. Atas komitmen dan inisiasi tersebut Disbudparpora menggandeng Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai aktor utama untuk berkolaborasi mensukseskan program tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan adanya wawancara dengan berbagai aktor mengenai kondisi awal terjadinya kolaborasi tersebut. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Judha selaku Kepala Disbudparpora Kabupaten Ponorogo menyampaikan bahwa “karena tentu kita (Disbudparpora) (membutuhkan juga (akademisi) dari perguruan tinggi disitu ada mahasiswa dan mahasiswi, ini mempunyai peran





terhadap program ini". Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Ayub selaku Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang menyatakan "Terjadi diskusi yang intens Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini dari tim percepatan pembangunan Kabupaten Ponorogo serta Disbudparpora Kabupaten Ponorogo dengan kami (akademisi) di Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk membangkitkan kembali gairah pariwisata dan membangkitkan kembali proses percepatan pembangunan tersebut". Berdasarkan hal tersebut yang mendasari terjalinnya kolaborasi awal diantara aktor utama yaitu pemerintah dengan akademisi yang kemudian menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam (MoU) untuk dapat melaksanakan program pemuda hebat dengan Kerjasama dan kesepakatan yang sudah ada.

Dari kolaborasi awal dua aktor yaitu pemerintah dan akademisi terus menghadirkan aktor-aktor baru yang turut terlibat dalam kolaborasi ini, diantaranya pihak swasta, media masa, dan pemuda itu sendiri. Wawancara dengan Bapak Ferry selaku Direktur CV. Najaha (Swasta) menyatakan "Dalam kolaborasi ini proses awalnya karena ada hibah dari Kedai reka ini nah karena model-model pembuatan aplikasi ini butuh CV atau butuh vendor, Nah itu saya menawarkan CV saya untuk masuk ke tender ini dan untuk mengerjakan aplikasi ini". Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Siti selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Ponorogo mengenai kondisi awal terjadinya kolaborasi dalam program pemuda hebat, menyatakan "Pemuda

Hebat kebetulan pelaksanaannya di Unmuh. Jadi Pak Ayub selaku dekan Fisip memberitakan bahwa Fisip bekerja sama dengan Pemkab Ponorogo untuk membuat semacam kelas untuk pemuda hebat, dari situ kita terus mengawal itu, berarti untuk koordinasi dan kolaborasi dengan Pak Ayub itu". Sedangkan dari aktor pemuda (masyarakat), disampaikan kondisi awal dapat mengikuti program pemuda hebat diawali pertama terdapatnya edaran tentang program kepemudaan sehingga memerlukan partisipasi dari pemuda itu sendiri dan kedua adanya intruksi dari pemerintah untuk menjadi delegasi pemuda hebat tersebut. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan dengan Adhla selaku pemuda hebat dari Desa Bajang yang menyatakan "Kalau saya sendiri proses saya mengikuti Program Pemuda Hebat ini tidak dilakukan seleksi secara umum tapi ditunjuk langsung oleh Bu Lurah, pihak desa langsung memberikan instruksi kepada saya untuk menjadi delegasi Pemuda Hebat tersebut".

Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan merupakan faktor yang berpengaruh terkait dengan keberhasilan dalam berkolaborasi. Untuk itu para pemimpin di sini harus mampu mengatur jalannya proses kolaborasi dan mampu memfasilitasi para pemangku kepentingan serta membangun kepercayaan satu sama lain agar tidak menimbulkan konflik dalam kolaborasi (Greenwood *et al.*, 2021). Seperti menurut Ridwan & Hartono (2023) dijelaskan bahwa seorang pemimpin fasilitatif adalah seseorang yang sanggup memfasilitasi





seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama di meja perundingan, bertatap muka, membangun rasa saling percaya, berkomitmen, membuat rencana strategi, peta jalan, visi-misi dan tujuan bersama yang disepakati. Dalam penelitian ini memiliki kaitan dengan kolaborasi dalam program pemuda hebat Kabupaten Ponorogo ini pada terdapatnya MoU antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai aktor utama dalam kolaborasi dalam program ini. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Judha selaku Kapala Disbudparpora Kabupaten Ponorogo “Untuk pelaksanaan ini kita (pemerintah) ada MOU dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Untuk mou itu kita mulai dari dinas disbudparpora itu sendiri, kemudian langsung dipimpin oleh Bapak Bupati juga kemudian ada di bidang Pora sendiri”. Kepemimpinan Bupati Ponorogo dengan Disbudparpora sebagai pemangku kebijakan memberikan fasilitas dan *supporting* penuh untuk keberlangsungan program pemuda hebat tersebut. Seperti halnya wawancara yang dengan Bapak Ayub selaku akademisi memperkuat penjelasan mengenai pemimpin memberikan pengaruh dalam keberhasilan suatu proses “Tentu itu adalah program unggulan dari Bupati Kabupaten Ponorogo Bapak Sugiri yang menginginkan percepatan proses pembangunan. Kampus hanya menambahi ide dan gagasan tersebut, bahwa Pemuda hebat juga harus mampu untuk berkontribusi dalam konteks pengembangan potensi di desanya”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut Utami dkk. (2020) kepemimpinan merupakan faktor yang sangat berperan dalam membawa *stakeholders* kedalam satu forum tersebut untuk mencapai suatu kesepakatan bersama serta membuat mereka semua terlibat. Dalam penelitian ini, Bupati Ponorogo mempunyai peran lebih dalam terlaksananya program pemuda hebat. Bupati Ponorogo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, memberikan sarana dan fasilitas kepada aktor terkait untuk dapat melaksanakan program pemuda hebat. Seperti yang disampaikan Adhla selaku pemuda hebat Desa Bajang melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti “Program Pemuda hebat itu sendiri merupakan yang dilaksanakan atau yang diinisiasi oleh Bapak Bupati kita yaitu Bapak Sugiri Sancoko, untuk menggerakkan pemuda-pemudanya mempromosikan potensi-potensi yang ada di desanya”. Berdasarkan penjelasan tersebut, tidak lain merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Bupati Ponorogo untuk dapat memaksimalkan potensi desa melalui sarana dan fasilitas yang diberikan dalam mendukung pelaksanaan program pemuda hebat.

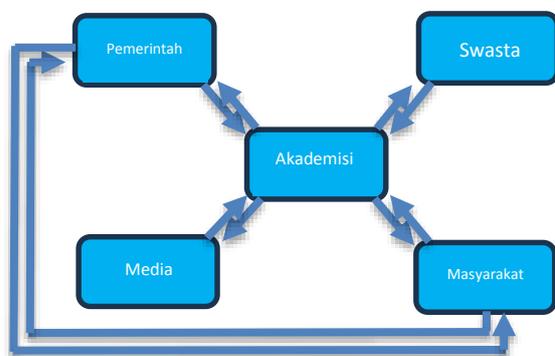
Desain Lembaga

Desain kelembagaan adalah aturan khususnya mengenai kerja sama yang dilakukan secara transparan, musyawarah dan berkeadilan dalam pelaksanaannya. desain lembaga ini mengacu pada aturan-aturan dasar untuk kolaborasi yang telah disepakati bersama *stakeholders* tidak hanya kesepakatan satu pihak saja menjelaskan bahwa kelembagaan mengacu pada aturan dasar untuk kolaborasi (Utami dkk, 2020). Hal tersebut



disampaikan juga menurut Ridwan dan Hartono (2023) Dalam desain kelembagaan aspek penting yang perlu mendapat perhatian adalah kejelasan aturan dan prosedur. Peraturan harus ditegakkan secara adil, transparan dan terbuka, sehingga para pemangku kepentingan dapat meyakini bahwa setiap musyawarah dan negosiasi yang dilakukan adalah nyata.

Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini, pelaksanaan kolaborasi ini, masing-masing aktor sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Masing-masing pihak dapat mempertanggungjawabkan tugas mereka sesuai dengan kebutuhan yang sudah disepakati. Seperti model kelembagaan *collaborative governance* dibawah ini, salah satu aktor utama yaitu Universitas Muhammadiyah Ponorogo mempunyai peranan penting dalam berjalannya kolaboratif ini.



Gambar 2. Model Kelembagaan *Collaborative governance* (Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2023)

Berdasarkan model kelembagaan *collaborative governance* dalam Program Pemuda Hebat Kabupaten Ponorogo ini,

aktor utama Pemerintah mempunyai konektifitas dan kerjasama dengan pihak Univeritas Muhammadiyah Ponorogo dan Pemuda Hebat (Masyarakat), sedangkan aktor utama lainnya Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam kelembagaan ini menjadi aktor yang mempunyai koneksi paling luas diantara yang lain. Pihak Universitas Muhammadiyah Ponorogo menjadi pihak yang berkolaborasi dan berkomunikasi dengan pihak Pemerintah, Swasta, Media, dan Masyarakat. Mengenai kerjasama yang dilaksanakan telah disepakati antara pihak-pihak yang berkepentingan tersebut agar tidak menimbulkan konflik dalam kerjasama ini, serta dalam melakukan negosiasi kegiatan terkait pelaksanaan program pemuda hebat juga dilakukan secara transparan melalui keikutsertaannya dalam program pemuda hebat sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses Kolaborasi

Dialog Antar Muka (*Face to face dialogue*)

Menurut Maulia dan Setiyono (2023) tahap awal dari proses kolaborasi ini adalah memfasilitasi dialog tatap muka antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam masalah kebijakan yang kompleks. Dialog ini menciptakan kesempatan bagi mereka untuk saling berkomunikasi, menyatakan pandangan, dan mengidentifikasi isu-isu utama. Dalam penelitian ini, penerapan *collaborative governance* dalam program pemuda hebat Kabupaten Ponorogo dengan aplikasi MerC-Des mendorong perkembangan dan promosi publikasi potensi yang dimiliki oleh desa dalam percepatan infomasi





berita, potensi desa, dan *event* yang akan dilaksanakan desa.

Menurut Saputra dkk (2022) *collaborative governance* menjelaskan kedudukan dan kondisi peran pemerintah untuk memenuhi tujuan-tujuan publik melalui suatu proses kolaborasi berkesinambungan antar organisasi maupun individu dengan menetapkan satu konsep arah tujuan pembangunan dan kebijakan. Wawancara dengan Bapak Gammar selaku Tim Pengendalian Program Khusus (TP2K) Kabupaten Ponorogo “Pertama kita menyusun Proposalnya itu sudah berulang kali, intinya dari kabupaten menawarkan jika minta agar dibikinkan aplikasi kepada Universitas Muhammadiyah Ponorogo, kemudian pada saat pelaksanaan itu dilakukan diskusi juga, koordinasi juga”.

Berdasarkan hal tersebut, aktor-aktor utama dalam pelaksanaan *collaborative governance* ini telah melakukan pertemuan secara tatap muka dengan masif untuk keberlangsungan program yang ada. Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Priono dan Rusli (2023) yang menyatakan bahwa dalam *collaborative governance*, dialog tatap muka sebagai bentuk komunikasi yang penting yang menggunakan pesan untuk mencapai makna yang sama antara dua orang atau lebih dalam situasi di mana pembicara dan pendengar memiliki kesempatan yang sama.

Pemerintah dalam kolaborasi program pemuda hebat ini berperan sebagai pihak yang memprakarsa atas pelaksanaan daripada visi misi Bupati Ponorogo tentang kepemudaan yang dalam hal ini berupa program pemuda hebat. Pemerintah juga bertindak sebagai pihak yang melaksanakan *monitoring* dan

evaluasi terhadap pelaksanaan program pemuda hebat di lapangan. Wawancara dengan Bapak Wachid selaku bagian Bidang Kepemudaan Disbudparpora Kabupaten Ponorogo “Dinas ini (Disbudparpora) sebagai pelaksana, pelaksana dari program-program khusus Bapak Bupati”. Berdasarkan hal ini, pemerintah sebagai pelaksanaan dalam program ini, mempunyai fungsi penuh dalam terselenggaranya kolaborasi dengan aktor dan pelaksanaan programnya.

Berdasarkan Gambar 2 model kelembagaan *collaborative governance*, terkait kerjasama pemerintah mempunyai peran sebagai pihak yang melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk melakukan pengajuan bersama kepada Kedaireka terkait program pemuda hebat dan aplikasi *MerC-Des*. Akademisi mempunyai peran dalam kolaborasi dan kerjasama program pemuda hebat ini sebagai penggagas dan perencana terkait pengusulan aplikasi *MerC-Des* kepada Kedaireka, yang aplikasi ini digunakan sebagai wadah bagi para pemuda hebat untuk mengembangkan bakat dan mempromosikan potensi yang dimiliki desanya. Aktor swasta dalam kerjasama program pemuda hebat berperan sebagai pihak yang membuat dari aplikasi *MerC-Des*, yang disini CV. Najaha telah memenangkan proses lelang pembuat aplikasi yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Terkait kerjasama ini, swasta berperan ikut berkontribusi dalam menghadirkan wujud dari aplikasi Kemudian aktor media menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak akademisi, sehingga terkait informasi mengenai program ini media



berkoordinasi dengan pihak akademisi. Tentunya dengan adanya media dapat memberikan gambaran terkait program pemuda hebat ini mengenai eksistensi dan kredibilitas kegiatan dalam program ini. Aktor terakhir pemuda hebat (masyarakat) yang akan mengikuti serangkaian kegiatan seperti pelatihan-pelatihan dan pembuatan konten terkait potensi yang dimiliki dari desanya.

Membangun Kepercayaan (*Trust building*)

Dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, terdapat beberapa proses untuk menuju dari *collaborative governance*. Tahapan atau proses tersebut merujuk dalam rangka membangun kepercayaan diantara aktor satu dengan yang lain. Menurut Ridwan dan Hartono (2023) dalam membangun kepercayaan dibutuhkan peran kepemimpinan untuk membantu para *stakeholder* yang terlibat dalam proses kolaborasi, hal ini juga agar tidak terjadinya konflik. Dalam proses membangun kepercayaan antara aktor ini terjadi setelah adanya dialog antar muka pada proses awal dalam pertemuan yang terjadi antar aktor pada kolaborasi dan kerjasama program pemuda hebat ini. Dengan adanya kepercayaan antara aktor ini memberikan pengertian bersama dan kesepahaman mengenai proses *collaborative governance* yang akan dibangun kedepannya. Wawancara dengan Bapak Judha selaku Kepala Disbudparpora Kabupaten Ponorogo menegaskan “Ada petunjuk teknisnya, mulai dari tentu dalam pelaksanaan ini terdapat kerangka acuan kerja (KAK), jadi

kerangka acuan kerja karena ini ditopang dan dibiayai oleh pemerintah daerah atau APBD”. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Gammar Arianto selaku Tim Pengendalian Program Khusus (TP2K) Kabupaten Ponorogo dalam wawancara “Jadi mulai dari pertama kita menyusun proposalnya itu sudah berulang kali, intinya dari kabupaten menawarkan jika minta agar dibikinkan aplikasi kepada Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini, terus kemudian pada saat pelaksanaan itu dilakukan diskusi juga, koordinasi juga”.

Berdasarkan hal tersebut, aktor pemerintah dengan akademisi, melakukan upaya awal dalam membangun kepercayaan diantara aktor yang ada. Ansell dan Gash (2007) menjelaskan bahwa membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat di tengah keterbatasan kapasitas dan perbedaan antar *stakeholders*. Keterbatasan dan perbedaan tersebut yang dapat dijadikan salah satu dorongan untuk dapat membangun kepercayaan diantara aktor.



Gambar 3. *Focus Group Discussion (FGD)* Pelaksanaan Program Pemuda Hebat (Sumber : Dokumentasi Kedai Reka)

Berdasarkan gambar 3 aktor pemerintah dengan akademisi melakukan pertemuan dalam rangka membangun





kepercayaan diantara kedua aktor utama. Pertemuan tersebut membahas mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan program pemuda hebat yang akan dilaksanakan. Pertemuan tersebut menyajikan dan menghadirkan berbagai temuan dan kesepakatan yang disepakati oleh aktor-aktor tersebut untuk keberlangsungan program pemuda hebat. Hal ini diperkuat oleh Sultan (2022) bahwa selama dialog tatap muka awal, pemangku kepentingan perlu membangun rasa saling percaya satu sama lain. Ini dapat dicapai melalui pembentukan hubungan personal, pertukaran informasi yang jujur, dan berkomitmen.

Komitmen dalam Proses Kolaborasi (*Commitment to process*)

Menurut Zulhadi dkk (2023) bahwa suatu komitmen memerlukan kepercayaan agar tanggungjawab masing-masing *stakeholders* dapat dijalankan dengan baik. Komitmen pada proses kolaborasi perlu dengan membangun kesadaran yang saling ketergantungan antar *stakeholder*. Berdasarkan dari tahapan membangun kepercayaan antar aktor ini, komitmen dalam proses kolaborasi terjadi setelah terjadinya dialog antar muka dan terbangunnya kepercayaan antar pihak-pihak. Wawancara dengan Bapak Judha selaku kepala Disbudparpora Kabupaten Ponorogo “peran terhadap program ini sehingga untuk pelaksanaan ini kita ada MOU dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Untuk mou itu kita mulai dari dinas disbudparpora, kemudian langsung dipimpin oleh Bapak Bupati juga kemudian ada di bidang Pora sendiri”.

Komitmen tersebut dapat terlaksana karena kepercayaan antar

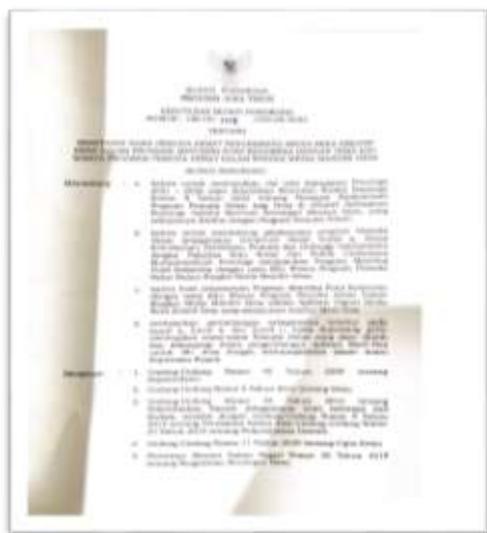
aktor sudah terbangun dan masing-masing sudah mempercayai akan kinerja serta tugas fungsi dari masing-masing pihak terlibat. Menurut Kurniawan (2024) komitmen pada proses terlihat dari adanya kesadaran bahwa para aktor saling membutuhkan dan ketergantungan satu sama lain untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada agar selalu tercipta keberlanjutan (*sustainable*) dalam proses kolaborasi. Penerapan *collaborative governance* dalam program pemuda hebat adalah meningkatkan akses, kesepakatan bersama, pengiriman informasi pemerintah dan layanan kepada masyarakat, mitra, serta lembaga.

Pemahaman Bersama (*Sharing Understanding*)

Menurut Hidayat (2022) dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling memahami tentang mengenai apa yang dapat mereka (*stakeholder*) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling memahami antar stakeholder juga dapat diwujudkan dengan adanya misi-visi dan tujuan bersama. Berdasarkan dengan tahapan dari pemahaman bersama dalam terjadinya *collaborative governance* di atas dapat dikatakan bahwa setiap pihak atau *stakeholder* yang terlibat dalam dampak sementara (*intermediate outcome*) dari adanya kolaborasi dalam perencanaan program pemuda hebat. Wawancara dengan Bapak Judha selaku kepala Disbudparpora Kabupaten Ponorogo “Dari Universitas Muhammadiyah, kemudian dari pemerintah juga, kemudian dari tim tp2k juga mempunyai peran. jadi beberapa elemen ini mempunyai yang menjadi aktor dalam pelaksanaan kebijakan ini”. Pernyataan tersebut



didukung oleh Bapak Gammar selaku Tim Pengendalian Program Khusus (TP2K) Kabupaten Ponorogo “Kalau aktornya dengan pemuda hebat ini tentunya dari Disbudparpora, bagian dari pemuda Bapak Wachid, mulai dari mengidentifikasi potensi pemudanya kemudian meloloskan proposalnya kemudian meloloskan ke walinya itu sudah dari Disbudparpora. Kalau dari kami tp2k lebih ke hasilnya atau ke arahnya bahwa pemuda itu harus begini, harus begitu, harus menghasilkan ini, harus menghasilkan itu. Jadi antara pemerintah, tp2k dan universitas”.



Gambar 4. Surat Keputusan Bupati Ponorogo
(Sumber : Dokumen Kedaireka Tahun 2022)

Berdasarkan gambar 4 terdapatnya Surat Keputusan Bupati Ponorogo, menjadi satu bentuk tonggak acuan mengenai pemahaman bersama yang harus dijalankan oleh masing-masing

aktor sebagai bentuk kolaborasi yang sedang dijalankan dalam program pemuda hebat. Terjalannya kesepahaman ini tidak lain dikarenakan kesadaran masing-masing aktor akan ketidakmampuannya untuk melaksanakan program pemuda hebat secara mandiri, sehingga memerlukan aktor lain yang dilibatkan dalam program ini. Hal ini diperkuat menurut Harmiati dkk (2020) *collaborative governance* dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah publik dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Sedangkan menurut Ansel and Gash dalam Priono dan Rusli (2023) menjelaskan bahwa pemahaman bersama di beberapa tempat dalam siklus kooperatif, mitra harus menumbuhkan pemahaman khas tentang apa pada umumnya dapat mereka capai bersama.

Dalam penelitian ini, koordinasi dan keterlibatan dari beberapa aktor ini sangat penting dalam menjalankan kerjasama pada program pemuda hebat ini, aktor-aktor ini merupakan kunci dari hubungan kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan bersama dari kolaborasi yang ingin diwujudkan di awal. Hal ini juga menjadi indikator yang menunjukkan seberapa kuatnya hubungan yang dibangun antara pemerintah, akademisi, swasta, media, dan pemuda.

Dampak Sementara (*Intermediate Outcome*)

Menurut Yunifar dkk (2022) buah hasil dari proses kolaborasi dapat terwujud dalam bentuk output atau





program yang nyata. Sementara menurut Hidayat (2022) dalam proses ini, hasil sementara dimaksud sebagai hasil proses yang signifikan untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kolaborasi yang sukses, terlepas dari kenyataan bahwa hasil antara dapat mewakili keluaran yang sebenarnya. Dalam kolaborasi yang terjalin dari beberapa pihak mengenai *collaborative governance* Program Pemuda Hebat, terdapat pengaruh yang menjadikan penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program ini. Fenomena tersebut memberikan gambaran mengenai hal-hal yang menjadi faktor penghambat dan menjadi faktor pendukung dalam implementasi program pemuda hebat ini, kedua faktor tersebut sebagai berikut. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program pemuda hebat ini dengan adanya dukungan maksimal dari berbagai pihak yang terlibat. Wawancara dengan Bapak Judha selaku Kepala Disbudparpora Kabupaten Ponorogo “Ya kita sangat sangat mendukung sekali karena di dalam aplikasi ini ada upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat, bagaimana meningkatkan perekonomian, bagaimana meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat itu”. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Wachid selaku bidang Pemuda Disbudparpora Kabupaten Ponorogo dalam wawancara “Karena program di desa tidak banyak ini, banyak program yang digulirkan dari Pemkab ke desa dan salah satunya Pemuda hebat ini, yang sebenarnya respon positif itu justru di program Pemuda hebat ini”. Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diperhatikan bahwa dalam awal pelaksanaan

collaborative governance ini banyak *support* dan dukungan dari aktor-aktor yang lain terkait pelaksanaan program pemuda hebat. Sehingga program ini dapat dimulai dan dilaksanakan dengan lancar.

Sedangkan faktor penghambat berdasarkan pelaksanaan di lapangan, hadir beberapa fenomena yang terjadi di luar dari teknis pelaksanaan. Faktor tersebut menjadikan penghambat dalam melaksanakan kegiatan dalam program ini. Wawancara dengan Bapak Ayub selaku akademisi Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam wawancara “Ya kendalanya itu tadi, orang yang melakukan proses pengisian konten di aplikasi itu, bayangkan 281 desa kita trail, ini ada 150 desa Pemuda hebatnya tentu memiliki karakter yang bersamasama. Kalau secara aplikasinya pastinya akan masih berkembang mengikuti proses keinginan dan dinamika zaman seperti yang sudah saya sampaikan misalkan menginginkan marketplace itu ada di aplikasi, menginginkan proses transaksi itu bisa dilakukan di aplikasi”. Hal ini juga didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Adhla selaku pemuda hebat Desa Bajang dalam wawancara “Untuk kendalanya sendiri, seperti yang saya sampaikan di awal tadi yaitu untuk proses loading untuk diaplikasinya tersebut masih lama karena aplikasinya terbilang cukup besar ukurannya, kemudian masih terdapat banyak bug”

Hal demikian seperti yang disampaikan oleh Bapak Ferry selaku Direktur CV. Najaha (wasta) dalam wawancara “Saya rasa karena dikerjakan oleh teknik IT yang mempunyai kapasitas atau kemauan yang tinggi saya rasa tidak ada kendala untuk membuat aplikasi ini,



untuk aplikasi ini tidak ada masalah. Mungkin dari RAB yang masih butuh di perbarui, tapi untuk konsep aplikasinya saya rasa sudah bagus. Tinggal pengelolaannya dan untuk pengembangannya aja". Dalam penelitian ini, komunikasi, koordinasi, dan penyampaian informasi yang terjalin baik antara pemerintah dengan pemuda hebat, menghadirkan konektivitas yang baik sehingga terjadinya kesepahaman mengenai pelaksanaan program ini. Menurut Anggrain dan Mashur (2022) *collaborative governance* melibatkan secara orientasi konsensus dan musyawarah dalam pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik dan program publik. Faktor penghambat dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Collaborative governance yang dilakukan dalam program pemuda hebat ini berjalan secara efektif sebagai bentuk kolaborasi dalam memaksimalkan dari pelaksanaan program tersebut. Kolaborasi yang terjalin antar aktor (Pemerintah, akademisi, *vendor* aplikasi (swasta), media, dan masyarakat) sangat dibutuhkan untuk memberikan kelancaran dalam pelaksanaan program pemuda hebat. Dengan menggunakan pendekatan teoritis *collaborative governance* dapat memperlancar dan mempermudah dalam mensukseskan program untuk menjadikan bentuk

supporting dan motivasi bersama dalam mensukseskan kelangsungan pelaksanaan program pemuda hebat.

Hubungan yang baik antara aktor utama dalam kolaborasi ini memberikan dampak positif dalam keberlangsungan kerjasama ini. Masing-masing aktor utama mempunyai tanggungjawab masing-masing untuk melaksanakan program dalam menggandeng pihak lainnya untuk bergabung dalam kolaborasi ini. Dalam hal ini terdapat sejumlah lima pihak yang turut bergabung dalam kolaborasi dalam program ini, sehingga dari kelima aktor yang bergabung dan terlibat ini mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang kelembagaan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan program pemuda hebat.

Hasil dari penelitian ini menghasilkan bentuk baru mengenai model kelembagaan dalam *collaborative governance*, dimana pemerintah sebagai inisiator pengagas program ini tidak sepenuhnya melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan antar aktor yang terlibat kolaborasi. Terlebih aktor utama pendukung Universitas Muhammadiyah Ponorogo menjadi satu aktor yang berkoneksi dengan seluruh aktor yang bergabung dalam kolaborasi. Ini menarik untuk dilakukan penelitian berkelanjutan untuk melihat seberapa dalam aktor utama pendukung tersebut dapat mempunyai pengaruh lebih besar dibandingkan aktor utama inisiator program.

Saran

Saran dalam penelitian ini, untuk aktor dari instansi pemerintahan, dalam pelaksanaan kolaborasi untuk lebih masif





dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi kepada pemuda hebat, untuk aktor akademik dapat lebih mengoptimalkan potensi materi yang dapat diberikan kepada para pemuda hebat, untuk aktor swasta dapat lebih meningkatkan kualitas dari aplikasi yang dirancang, sehingga visualisasi dan komponennya dapat tepat guna, untuk aktor media dapat lebih masif lagi dalam membuat berita-berita mengenai progress program ini, dan yang terakhir aktor masyarakat (pemuda hebat) dapat meningkatkan kompetensi diri supaya dapat memaksimalkan dari materi atau keterampilan yang berikan selama pelatihan dalam program pemuda hebat. Saran bagi peneliti selanjutnya, dapat meneliti berkaitan produk aplikasi yang dibuat untuk program ini dengan dihubungkan dengan peran aktor-aktor ini dalam penyusunannya. Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk menggunakan lebih banyak sumber data/referensi mengenai *collaborative governance*, sedangkan objek penelitian ini diharapkan dapat diperluas dan tidak terbatas pada aktor *collaborative governance* saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiandri, A., Akbar, D., & Ikhsan, K. (2019). *Collaborative governance: Suatu konsep penguatan kelembagaan dalam dunia investasi*. Umrahpress. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=m2ZNEAAQBAJ>
- Andayani, R. D., Huda, M. M., & Taufiq, A. (2022). Collaborative Governance Dalam Menjaga Kamtibmas Di Kampung Pesilat Kabupaten Bojonegoro, 10(1), 1–52. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Ansell, & Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*, 543 571.
- Ardana, S. N. (2022). *Penerapan Collaborative Governance Pusat Informasi Wisata Dolan Ngebel Melalui Website Dolanngebel.com*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2018). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis)*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.33005/mebis.v3i1.21>
- Doi, P. (2023). Collaborative Governance In Management Of Forest Land Owned To, 7(2), 196–211. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v7i2.798>
- Greenwood, S., Singer, L., & Willis, W. (2021). *Collaborative Governance: Principles, Processes, and Practical Tools*. Taylor & Francis. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=wylEAAAQBAJ>
- Gurvantry, D., Febriansah, A., & Tampubolon, J. (2022). Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata E kang di Kabupaten Bintan). *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 1(3), 174–178. <https://doi.org/10.24036/publicnes>





- s.v1i3.65
- Hamzah. (2022). Ratusan Pemuda Hebat Promosikan Wisata Ponorogo Lewat Aplikasi Matching Fund. Retrieved from <https://umpo.ac.id/848-ratusan-pemuda-hebat-promosikan-wisata-ponorogo-lewat-aplikasi-matching-fund.html>
- Harmiati, Alexander, Deni Triyanto, Margaret Maya, & Frensi Riastuti. (2020). Analisis pemetaan Collaborative Governance dalam Program Keluarga Berencana di Kota Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 65–76.
- Hidayat, W. (2022). Collaborative governance dalam pengembangan digitalisasi umkm pada era revolusi industri 4.0 di wilayah bangka belitung. *TheJournalish: Social and Government*, 3(3), 247–254. <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.317> COLLABORATIVE
- Idris, I., Herdiana, D., & Mujtahid, I. M. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 9810–9819. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3269>
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. Deepublish. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=L5mJDwAAQBAJ>
- Kurniawan, I. A., Machrunnisa, & Firna, N. A. (2024). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 13–21.
- Maulia, E. I., & Setiyono, B. (2023). Collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis dampak digitalisasi desa wisata. *Journal of Politic and Government Studies*, 31(1), 404–418.
- Miles, Huberman, & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis Methods. Sourcebook-SAGE Publications*. (Vol. 59).
- Nur. (2022). Bupati Ponorogo Jadi Pemateri Pembekalan Pemuda Hebat, PKK Akademia dan Circle-P. Retrieved from <https://www.jatimpos.co/jatim/materi/9745-bupati-ponorogo-jadi-pemateri-pembekalan-pemuda-hebat-pkk-akademia-dan-circle-p>
- Nurhayati, N., & Rahman, A. (2023). Systematic Literature Review: Tata Kelola Kolaboratif Dalam Sektor Publik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i1.9207>
- O'Flynn, J., & Wanna, J. (2008). *Collaborative Governance: A New Era of Public Policy in Australia?* ANU E Press. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=kUlsWMq6VBEC>
- Permatasari, A. (2023). Collaborative Governance Bumdes Margaasih Kabupaten Bandung. *Reformasi*, 13(1), 25–33. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4370>
- Pemerintah Kabupaten Ponorogo (2022).





- Petunjuk Pelaksanaan Program Pemuda Hebat Bagi Desa Di Wilayah Kabupaten Ponorogo Melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022.
- Priono, S., & Rusli, Z. (2023). Pengembangan Wisata Kampung Bandar Berbasis Collaborative Governance oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Tambusai*, 7(2), 16011-16017.
- Qoyimah, D., Wardana, M. R., Susi, N., Nooresa, A. F., Muttaqin, M. I., & Wijaya, S. R. (2023). Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi [Collaborative Governance: A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 182-202. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.317>
- Ridwan, N. A., & Hartono, S. (2023). Collaborative Governance Program Sinau Bareng Untuk Mengatasi Kekerasan Kepada Anak Di Kelurahan Kandangan Surabaya. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(6), 149-156. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jikma-itb.v1i6.1075>
- Saputra, A. A., & Ismaniar. (2019). Peran Pemuda Sebagai Agent of Change Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Pariwisata Kuliner Di Kampung Nelayan Ampang Pulau Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(4), 835-842.
- Saputra, P. R., Lendra, W., & Destrilia, I. (2022). Pengembangan Wisata dan Ekonomi Kreatif Lampung dalam Perspektif Collaborative Governance. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 13(1), 33-48. <https://doi.org/10.23960/administratio.v13i1.278>
- Sher-Hadar, N., Lahat, L., & Galnoor, I. (2020). *Collaborative Governance: Theory and Lessons from Israel*. Springer International Publishing. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=G08AEAAAQBAJ>
- Sukanti, S., & Faidati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(1), 91-113. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.418>
- Sultan, M. (2022). Kolaborasi Stakeholder's Dalam Penyelenggaraan Corporate University Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 3(2), 81-94. <https://doi.org/10.56259/jwi.v3i2.135>
- Supriadi, H. (2018). Analisa Kritis Atas Motif Policy Community Dalam Kolaborasi (Studi Kasus Kebijakan Pindahan Pusat Pemerintahan Provinsi. *Agresi*, 6(2), 139-148.
- Sutrisna, I. W. (2022). Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Peran Karang Taruna, 5(2).





Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7.

Wanti Anggrain, N., & Mashur, D. (2022). Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Journal of Social and Policy Issues*, 1, 34–38. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.31>

Wida Lestari, Eka Yulyana, L. A. (2022). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Alam Green Canyon di Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://jurnal.unibrah.ac.id/index.php/JIWP>, 8(3), 178–183. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6557133>

Yunifar, A. T., Kusbandrijo, B., & Puspaningtyas, A. (2022). Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(04), 5–24.

Zakia, E. L., & Wicaksono, I. (2023). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Desa Devisa di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, 1–11.

Zulhadi, Pitono, A., & Wargadinata, E. L. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung. *Jurnal*

Pendidikan Dan Konseling, 5, 1244–1255.

PROFIL SINGKAT

Moch. Rifqi Mei Redha : Mahasiswa Semester Akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Yusuf Adam Hilman : Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo

